

**HAMBATAN-HAMBATAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TANAH
GARAPAN PADA AREAL EKS HGU PTPN II KEBUN HELVETIA :
ATAS ADANYA SK KBPN NOMOR 42/HGU/BPN/2002**

CHRISTINA CAROLYN

ABSTRACT

PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) is a state-owned enterprise which conducts a large part of its plantation business in North Sumatera. The status of the land rights controlled and managed by this company is regulated in the Land Law and Law No. 40/1966. The work on the land occurred during the Japanese occupation in Indonesia when there was an emergency in food supply so that people began to work on the estate land; since then, the work on land has become increasing. The result of the research showed that, according to SK KBPN No. 42/HGU/BPN/2002, dictums 3 and 4, it is stated that the management, the control, the ownership, and the use of land is handed over to the governor of North Sumatera and will be distributed to the appropriate persons before there is the discharge from the related Minister.

Keywords: Legal Problems, the Settling of Crop Land, Area of Ex-Leasehold, PTPN II Helvetia Plantation.

I. Pendahuluan

Tanah garapan ialah hubungan antara penggarap dengan sebidang tanah Negara baik berdasarkan surat-surat keputusan (bukan pemberian hak atas tanah), surat izin, atau surat-surat lain, maupun yang tidak berdasarkan sesuatu surat pemberian termasuk dalam pengertian garapan ini.¹ Dalam UUPA tidak mengatur adanya tanah garapan karena tanah garapan bukan status hak atas tanah. Dalam peraturan Perundang-Undangan terdapat istilah tanah garapan yaitu tanah tanpa ijin pemilik/kuasanya dan pendudukan tanah tidak sah.²

Ditinjau dari sejarahnya PT Perkebunan Nusantara II merupakan gabungan dari bekas PT Perkebunan II dan bekas PT Perkebunan IX. Awal penggarapan terjadi sejak pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan maupun sebagai akibat perjuangan kemerdekaan

¹ Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal 112.

² B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung Tbk, cetakan kedua, Juni, 2005), hal 80.

Republik Indonesia yang menimbulkan keadaan darurat dalam soal persediaan pangan, sehingga banyak rakyat mengusahakan tanah-tanah perkebunan.³

Pada kebun Helvetia, permasalahan pertanahan sama dengan yang terjadi pada areal PT Perkebunan Nusantara II pada umumnya. Luas areal PTPN II Kebun Helvetia berdasarkan daftar lampiran SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 adalah 1.322,2900 Ha sesuai dengan hasil pengukuran yang digambarkan dalam Peta Pendaftaran Nomor 59/1997 tanggal 24 November 1997, sedang yang diterbitkan HGU nya adalah 1.128,3500 Ha terdiri dari seluas 1.029,7300 Ha, yang diberikan tahap pertama berdasarkan SK Nomor 58/HGU/BPN/2000 dan seluas 98.6200 Ha yang diberikan tahap kedua berdasarkan SK Nomor 42/HGU/BPN/2002, sementara areal yang tidak diperpanjang/dikeluarkan dari areal yang dimohonkan HGU nya seluas 193,9400 Ha dengan perincian tuntutan rakyat adalah 0,32 Ha, Garapan Rakyat seluas 0,97 Ha, dan Perumahan Pensiunan Karyawan seluas 27,78 Ha. Namun tuntutan/garapan yang direkomendasikan untuk diperpanjang HGU nya seluas 98,6200 Ha.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian garapan yang dilakukan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia?
3. Apa hambatan-hambatan hukum dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian garapan yang dilakukan pada areal Eks

³ Bahan Ekspos Kepala BPN Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Panitia B “Plus” tanggal 10 April 2001 di Jakarta, *Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Pada Areal PTPN II*, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Medan 2001, hal.1-2.

HGU PTPN II Kebun Helvetia.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan hukum dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder ang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus, ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, teknik dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan bahan yang merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku/literatur, majalah serta bahan-bahan yang berhubungan dengan judul.

- b. Pedoman Wawancara.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (Interview). Informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam pernelitian ini yaitu Badan Pertanahan Nasional, PT Perkebunan Nusantara II Kebun Helvetia dan Penggarap.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Surat Keputusan KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 menyatakan bahwa terhadap areal Eks HGU yang tidak diperpanjang maka penyelesaian tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengatur P4T yaitu mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah setelah mendapat izin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang. Hingga saat ini belum ada izin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sehingga Gubernur belum dapat mendistribusikan baik dalam hal ini kepada tuntutan rakyat, garapan rakyat, rumah pensiunan karyawan dan bahkan RUTR/RUTW.⁴

Menurut Muhammad Zamkani, selaku Deputy Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, makna pelepasan asset lahan tersebut juga belum ada persamaan persepsi, sebab menurut versi Kementerian BUMN, jika HGU habis maka tidak serta merta lahan itu menjadi milik masyarakat atau milik Negara cq.Pemda. Jika PTPN II sebagai pihak lama yang mengelola nya masih mau, maka HGU diperpanjang lagi untuk PTPN II. Namun tidak dipungkiri, jika sudah ada putusan Pengadilan yang memerintahkan lahan itu dilepaskan, maka Kementerian BUMN juga melepaskannya, akan tetapi kewenangan pelepasan asset tersebut harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiap jajaran direksi juga sudah mempersiapkan solusi, serta harus berhati-hati karena menyangkut tanggung jawab menjaga asset. Menurut Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Managam Manurung, bahwa lahan di PTPN II sudah tidak lagi menjadi ranah BPN untuk memproses penyelesaiannya, sebab pihak BPN sudah memutuskan tidak lagi memperpanjang HGU untuk PTPN II di lahan-lahan yang bermasalah, dan hal tersebut dibenarkan oleh Kementerian BUMN telah menerima surat permintaan pelepasan asset. Akan tetapi Kementerian BUMN belum mau melepaskan asset, samping itu BUMN belum puas dengan hasil pemetaan Tim Khusus yang dibentuk oleh Gubsu Gatot Pujo Nugroho berdasarkan SK Gubsu tanggal 23 September 2011 sebab PTPN II itu sendiri tidak masuk dalam tim tersebut.⁵

Bentuk penyelesaian yang dilakukan bagi pihak PTPN II Kebun Helvetia saat ini adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik ke kepala desa maupun Polisi setempat bahwa areal HGU tersebut masih asset PTP dan jika tidak diindahkan masyarakat dan justru semakin bertambah garapan maka setelah itu

⁴Wawancara dengan Hasinuddin, selaku bagian Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, tanggal 05 Februari di Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Medan.

⁵BUMN Ogah Lepas Lahan Eks HGU PTPN 2, <http://sumutpos.co/2012/05/34736/bumn-ogah-lepas-lahan-eks-hgu-ptpn-2>, diakses hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013.

ditindak lanjuti dibuat berupa pengaduan ke Polisi setempat dan ke Kejaksaan Tinggi, demikian juga seperti di kantor direksi PTPN II Tanjung Morawa sama halnya bertindak seperti yang dilakukan PTPN II Kebun Helvetia serta melakukan perkembangan seluruh kebun-kebun yang termasuk dalam areal PT Perkebunan Nusantara II. Maka agar tidak semakin bertambahnya garapan, pihak PTP Kebun Helvetia tetap berusaha melakukan suatu program penanaman areal produksi tanaman keras seperti program tebu dan tembakau. Dengan tujuan agar tidak semakin bertambahnya garapan, sebab jika ada rakyat penggarap yang ingin mencoba untuk merusak areal produksi tersebut maka pihak PTP Kebun Helvetia dengan mudah untuk melakukan pengaduan ke Polda. Sebab pihak PTP tetap mempertahankan Hak Guna Usaha yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024, demikian dilansirkan David Ginting selaku Assisten Manager PTPN II Kebun Helvetia.⁶

Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia B Plus yang telah meneliti dan memeriksa areal perkebunan tersebut, maka dari luas yang dimohonkan khusus pada Kebun Helvetia 1.332,2900 Ha, yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha pada Kebun Helvetia seluas 1.128,3500 Ha, sedangkan areal diperpanjang/dikeluarkan dari areal yang dimohonkan HGU nya seluas 193,9400 Ha dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Tuntutan	Luas (Ha)
1.	Tuntutan Rakyat	0,32 Ha
2.	Garapan Rakyat	0,97 Ha
3.	Perumahan Pensiunan Karyawan	27,78 Ha
4.	RUTRW Kabupaten	164,87 Ha

Sumber : Risalah Panitia B Pemeriksaan Panitia B Plus Nomor 01/PPT/BP/2002

Terhadap penyelesaian areal Eks HGU PTPN II oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berusaha melakukan penanganan dengan membentuk kelompok kerja dalam rangka penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia. Hingga saat ini upaya dalam penyelesaian tanah garapan

⁶ Wawancara dengan David Ginting selaku Assisten Manager PTPN II Kebun Helvetia tertanggal 30 Januari 2013, pukul 11.23 WIB di Kantor PTPN II Kebun Heletia, desa Klambir Lima. Kecamatan Deli Serdang.

tersebut telah dilaksanakan dengan membuat tanda-tanda batas di lapangan seperti pemasangan pilar-pilar pada lokasi yang tidak diperpanjang HGU PTPN II dengan kerja sama antara oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional bersama dengan PTPN II. Namun penyelesaian tanah garapan ini rumit diselesaikan karena sulitnya menentukan nama-nama tuntutan rakyat, garapan rakyat, rumah pensiunan karyawan dan RUTRW sesuai dalam matriks Panitia B Plus berdasarkan fakta-fakta di lapangan serta belum adanya ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang, dan jika ijin tersebut telah terlaksana maka Gubernur dapat mendistribusikan kepada tuntutan-tuntutan yang sesuai dalam matriks Panitia B Plus.⁷

Bentuk penyelesaian bagi rakyat penunggu pemangku masyarakat adat yang juga merupakan salah satu dari tuntutan yang ada di areal PTPN II Kebun Helvetia, selama ini menurut Buyung menyatakan telah berbagai macam upaya penyelesaian yang telah dilakukan, seperti salah satunya menyurati kepada pejabat-pejabat yang berwenang bahkan ke Presiden, akan tetapi surat yang telah dilakukan rakyat penunggu tersebut tidak ditanggapi. Maka bagi rakyat penunggu hanya bertahan pada wilayah yang digarapnya.⁸

Hambatan-hambatan hukum dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia : Atas Adanya SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 tergolong dalam :

1. Hambatan Yuridis

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, sedangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengatur tentang ancaman pelanggaran

⁷Wawancara dengan Hasinuddin, SH, MHum selaku bagian Pengaturan Tanah Pemerintah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, tertanggal 05 Februari di Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Medan.

⁸ Wawancara dengan Buyung selaku pemangku adat Masyarakat Adat di bawah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumatera Utara, pada tanggal 22 Maret 2013 di kediaman Buyung.

terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang disebabkan dalam rumusan Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkebunan disusun secara samar-samar serta tidak jelas secara terinci terutama mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana serta pengertiannya terlalu luas dan rumit.⁹

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha

Selama ini UUPA merupakan sebagai landasan hukum dibidang pertanahan dinilai masih relevan dengan perkembangan jaman dan mampu untuk mengakomodasikan berbagai urusan pertanahan. Walaupun UUPA sudah 38 tahun tetapi masih banyak peraturan pelaksanaan yang belum dibuat selama ini sehingga visi dan misi UUPA yang populis menjadi tidak terwujud.¹⁰

Menurut Pasal 28 ayat (1) Hak Guna Usaha hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Asal tanah Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996 adalah tanah Negara maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang Hak Guna Usaha dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberian hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional. Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA). Demikian sama halnya dalam Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur jangka waktu Hak Guna Usaha adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, diperpanjang paling lama 25 tahun dan diperbaharui paling lama 35 tahun. Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 21 dan Pasal 27 UU Perkebunan, <http://sawitwatch.or.id/2011/09/putusan-mahkamah-konstitusi-atas-pasal-21-dan-27-uu-perkebunan/>, diakses hari Senin tanggal 8 Juli 2013.

¹⁰Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hal 198

Hak Guna Usaha diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut.¹¹

Menurut Pasal 17 PP Nomo 40 Tahun 1996, faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Guna Usaha dan berakibat tanahnya menjadi tanah Negara yaitu:

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya
2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak dan adanya telah ditetapkan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak, dan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
4. Hak Guna Usahanya dicabut
5. Tanahnya diterlantarkan
6. Tanahnya musnah
7. Pemegang Hak Guna Usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan bahwa adanya penurunan kualitas ruang sebagian besar wilayah menuntut agar adanya perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ini. Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam Penataan Ruang, perlu dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

¹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2005,hal 100.

Ruang dengan yang Undang-Undang Penataan Ruang yang baru, sehingga diterbitkan/dikerluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Tujuan penataan ruang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penatan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

B. Hambatan Kelembagaan

a. PT Perkebunan Nusantara II Kebun Helvetia

Menurut David Ginting selaku Assisten Manager PTPN II Kebun Helvetia begitu banyak hambatan dalam melakukan penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia. Hambatan-hambatan yang terjadi untuk melakukan penyelesaian tanah garapan tersebut antara lain:¹²

1. Pihak DPRD selalu tetap menyalahkan pihak PTP jika pihak PTP ingin menyelesaikan maupun mengadakan pembersihan garapan bahkan aparat kecamatan dan kepolisian tidak berani mendukung pihak PTP Kebun Helvetia sehingga pihak PTP ragu-ragu untuk melakukan penyelesaian tanah garapan tersebut sehingga pada akhirnya keluar putusan Gubernur yang menyatakan untuk tidak/ditahan melakukan pembersihan tanah garapan (okupasi).
2. Terjadinya perlawanan oleh pihak rakyat penggarap seperti bentrok fisik dengan pihak PTP Kebun Helvetia jika pihak PTP ingin melakukan pembersihan garapan seperti salah satunya membutuhkan lahan untuk areal produksi seperti tanaman semusim dalam program strategi yang dilakukan oleh pihak PTP agar tidak semakin bertambahnya garapan pada areal PTPN II Kebun Helvetia.

¹²Wawancara dengan David Ginting selaku Assisten Manager PTPN II Kebun Helvetia tanggal 30 Januari 2013, di PTPN II Kebun Heletia, desa Kelambir Lima, Kecamatan Deli Serdang.

3. Tidak pernah adanya dukungan oleh pihak DPRD.

b. Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Hambatan penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional khususnya dimaksud disini adalah Panitia B Plus yaitu :

1. Dokumen pembanding baik berupa surat maupun peta terhadap bukti yang diajukan oleh masyarakat penuntut/penggaarap ada yang tidak dijumpai lagi baik di kantor pemerintah propinsi maupun instansi Kabupaten/Kota.
2. Bukti-bukti/dasar tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya hanyalah surat-surat dalam bentuk fotocopy, bahkan sebagian hanya berupa sejarah kronologis tentang penguasaan tanah yang dibuat oleh penuntut itu sendiri tanpa di dukung oleh bukti yang kuat.
3. Adanya surat dukungan dari Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah serta Lembaga Legislatif terhadap tuntutan sekelompok masyarakat agar areal yang dituntut dapat diukur dan di distribusikan sementara permasalahannya masih ditangani oleh Panitia B Plus.
4. Sulitnya menentukan ada tidaknya hak ulayat di suatu wilayah Kabupaten/Kota karena belum ada pengaturannya dalam bentuk peraturan daaerah Kabupaten/Kota.
5. Adanya putusan pengadilan terhadap areal PTPN II maupun Pemerintah .
6. Subyek maupun obyek tuntutan yang tidak dapat di identifikasi di lapangan.

C. Hambatan Budaya/Sosiologi

Hambatan budaya/sosiologi yang terjadi antara lain:¹³

1. Adanya pemikiran hingga saat ini bagi penggarap khususnya bagi rakyat penunggu di Sumatera Timur bahwa tanah areal perkebunan tersebut merupakan tanah ulayat bagi masyarakat setempat yang diyakini hingga sekarang

¹³ Wawancara dengan Buyung selaku pemangku adat Masyarakat Adat di bawah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumatera Utara, pada tanggal 22 Maret 2013 di kediaman Buyung.

2. Hilangnya tradisi sistem rotasi dimana pada dahulu setiap panen tembakau Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mengusahai tanah tersebut tersebut dengan tanaman semusim sudah tidak diperbolehkan kembali menjadi hambatan budaya tersendiri dimana secara mayoritas para penggarap seperti salah satunya bagi rakyat penunggu mayoritas bermata pencaharian juga menjadi hambatan, hingga pada akhirnya hilangnya mata pencaharian bertani menjadikan bagi para penggarap semakin melalukan penggarapan serta berusaha untuk membangun bangunan baik permanen maupun semi permanen serta menanam tanaman semusim seperti padi dan jagung tanpa diketahui pihak perkebunan.
3. Adanya perbedaan pandangan tentang pengertian eks Hak Guna Usaha baik antara Pemerintah, pihak perkebunan serta bagi penggarap. Bagi penggarap pengertian eks Hak Guna Usaha yang disebut tanah Negara bagi mereka itu bukan tanah Negara, sebab menurut tradisi penggarap seperti bagi rakyat penunggu beranggapan bahwa dahulunya tanah yang di Sumatera Timur merupakan tanah perkampungan yang dikuasai oleh rakyat dan justru Pemerintah yang membuat kontrak untuk mengusahai tanah perkampungan yang bagi penggarap meyakini bahwa areal yang dimiliki pihak Perkebunan seperti saat sekarang ini adalah tanah ulayat mereka.
4. Belum adanya kesadaran hukum bagi masyarakat terlebih para penggarap serta tidak adanya bukti-bukti akurat untuk menuntut dalam setiap tuntutan jika benar-benar sah hak mereka sesuai peraturan yang berlaku. Seperti salah satunya tuntutan masyarakat adat yang dimana tidak dapat dibuktikan secara tertulis hanya buktinya seperti ada saksi hidup. Banyak upaya-upaya penyelesaian hukum yang telah dilakukan Pemerintah akan tetapi tidak membawa hasil yang baik dikarenakan pihak penggarap semakin bertambah banyak dan semakin sulit untuk diselesaikan.
5. Adanya sikap lapar tanah, sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba menguasai tanah Eks HGU PTPN II disamping hal tersebut adanya memonitoring para elit politik untuk menggarap tanah-tanah Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Perkembangan penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia hingga saat ini sesuai Surat Keputusan KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 bahwa terdapat areal Eks HGU yang tidak diperpanjang namun diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah setelah mendapat ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang. Sampai saat ini belum ada ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sehingga Gubernur belum dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.
2. Bentuk penyelesaian garapan yang dilakukan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia, ada dalam bentuk penyelesaian secara administratif yang dilakukan baik oleh PT Perkebunan Nusantara II, Badan Pertanahan Nasional maupun dari pihak Pemerintah Daerah, namun ada juga bentuk penyelesaian melalui lembaga pengadilan, maupun dalam bentuk penyelesaian sengketa alternatif dengan cara mediasi. Akan tetapi penyelesaian sengketa alternatif dengan cara mediasi tersebut tidak efektif sehingga berbagai bentuk penyelesaian garapan pada areal PTPN II Kebun Helvetia tetap penyelesaian tersebut tidak tuntas terselesaikan.
3. Hambatan-hambatan hukum dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia tergolong dalam hambatan yuridis, hambatan kelembagaan dan hambatan budaya/sosiologi. Hambatan yuridis dapat tergolong dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Demikian juga hambatan kelembagaan yang dilakukan oleh PTPN II Kebun Helvetia dan Badan Pertanahan Nasional untuk penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia serta hambatan budaya yang telah melekat sejak dahulu bagi rakyat penggarap pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia. Hambatan yuridis, hambatan kelembagaan maupun hambatan budaya dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II beraneka ragam

yang terjadi pada setiap kebun, sehingga bentuk-bentuk penyelesaian maupun hambatan-hambatan dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II tidak sama.

B. Saran

1. Perlu adanya tindakan yang jelas terhadap adanya ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sesuai SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 agar tidak semakin bertambahnya garapan dan penyelesaian tersebut secara adil sesuai dengan peruntukannya serta perlu adanya pengkajian pendataan ulang ke lapangan baik terhadap tuntutan masyarakat adat, tuntutan garapan maupun perumahan pensiunan karyawan PTPN II Kebun Helvetia sebelum di distribusikan, karena dikhawatirkan hasil Matriks yang dilakukan oleh Panitia B Plus yang sewaktu tahun 2002 lalu sudah tidak sesuai dengan lapangan yang dimana kita ketahui tuntutan garapan di areal Eks HGU PTPN II Helvetia semakin meluas.
2. Berbagai bentuk penyelesaian telah dilakukan baik dari Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional dan PT Perkebunan Nusantara II Kebun Helvetia bahkan bagi penggarap pun juga melakukan bentuk penyelesaian demi mendapatkan hak atas tanah yang mereka yakini bahwa tanah areal PTPN II Kebun Helvetia tersebut adalah tanah ulayat. Maka dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih efektif dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia sejalan dengan ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang, namun HGU yang tidak diperpanjang tersebut jika tidak diusahai oleh pemegang hak nya perlu adanya tindakan pelepasan asset dari Menteri yang berwenang dan tanah yang dilepaskan tersebut dapat diberikan untuk kepentingan masyarakat.
3. Perlu adanya kesadaran hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam mengajukan tuntutan sesuai dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setiap para pihak yang bersengketa diharapkan dapat patuh pada peraturan yang telah diberikan. Demikian juga kepada setiap kelembagaan yang ada perlu adanya ketegasan dengan mengesampingkan unsur politik dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II.

V. Daftar Pustaka

Bahan Ekspos Kepala BPN Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Panitia B “Plus” tanggal 10 April 2001 di Jakarta, *Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Pada Areal PTPN II*, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Medan 2001

B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung Tbk, cetakan kedua, Juni, 2005

Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, Bandung : Mandar Maju, 2002

Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah, Bandung : Mandar Maju, 2007

Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2005

Wawancara dengan Hasinuddin, selaku bagian Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, tanggal 05 Februari di Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Medan.

Wawancara dengan David Ginting selaku Assisten Manager PTPN II Kebun Helvetia tanggal 30 Januari 2013, di PTPN II Kebun Heletia, desa Kelambir Lima, Kecamatan Deli Serdang

BUMN Ogah Lepas Lahan Eks HGU PTPN 2,

<http://sumutpos.co/2012/05/34736/bumn-ogah-lepas-lahan-eks-hgu-ptpn-2>, diakses hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013.